



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Komentar (Hal. 11)

Senin, 6 April 2020

Selain KONI, PMI Juga Disorot Penggunaan Dana Hibah

Amurang, KOMENTAR

Dua organisasi non pemerintah yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Minsel dan Palang Merah Indonesia (PMI) Minsel tiap tahun mendapatkan kucuran hibah dari Pemerintah kabupaten (Pekab). Tidak tanggung-tanggung, masing-masing mendapat jatah Rp 1 miliar. Menjadi pertanyaan kemanakah dana itu mengalir?

KONI Minsel yang dipimpin James A Kojongian (JAK) disorot karena dituding 'irit' memberi dukungan anggaran pembinaan atlet. Bahkan bonus atlet juga tidak kunjung diberikan. Parahnya lagi dana bantuan dari Pemprov Sulut sesuai

pelaksanaan Porprov 2017 juga tidak mengalir bagi pembinaan atlet. Tak heran bila dicurigai dana hibah KONI tidak mengalir ke tempat semestinya.

Tak jauh beda dengan PMI yang dipimpin oleh Mikhaela E Paruntu yang tidak lain istri dari JAK. Kegiatan-kegiatan yang dihelat diragukan bila sampai menyedot anggaran sebesar Rp 1 miliar. Masyarakat juga tidak mengetahui kantor, sehingga minim terpantau. Apalagi sudah menjadi rahasia umum adik kandung Bupati Minsel ini akan turun berlaga di Pilkada Minsel yang tertunda.

"Kami mendukung BPK dapat memeriksa lebih detil

lagi pertanggungjawaban dari danah hibah baik di KONI dan PMI. Itukan dana milik-rakyat jadi harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Penggunaan juga harus sesuai dengan tujuan dan visi serta misi organisasi. Untuk kantor saja untuk KONI hampir bisa dikatakan tidak ada kegiatan, lalu diapakan anggaran hibahnya? Begitu pula dengan PMI. Jangan ditutup tutupi, bahkan bila perlu ada pemeriksaan lebih konkrit lagi," beber Jaclyn Koloay, Ketua Fraksi Primanas di DPRD Minsel.

Lanjut untuk PMI yang melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di desa-desa menurutnya pa-



tut diapresiasi. Namun harus terbuka berapa anggaran yang dikeluarkan. "Saya pernah melakukan kegiatan penyemprotan di rumah-rumah warga dan gedung-gedung publik. Satu desa tidak sampai Rp 500 ribu, itupun sudah dengan bayar tenaga penyemprot. Kalau di PMI kan ada relawan, nah penyemprotan di 167 desa dan 10 kelurahan anggarannya tidak akan sampai Rp 89 juta. Lalu sisanya tahun ini akan dibelanjakan apa? Begitu pula tahun lalu dan sebelum-sebelumnya," tegas Koloay yang juga ketua DPD Perindo Minsel.